

PELATIHAN **BERSERTIFIKASI**

# Implementasi Manajemen Risiko di Sektor Publik berbasis SNI ISO 31000:2018

22-24 September 2020

● Live Online

# Sinopsis



Saat ini, penerapan manajemen risiko bagi organisasi sektor publik telah menjadi suatu keharusan dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.



## RANCANGAN TEKNOKRATIK

# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024

Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi  
yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan



Pelatihan Manajemen Risiko Sektor Publik SNI ISO 31000 2018 ini disiapkan dan dirancang oleh CRMS Indonesia untuk memberikan pemahaman dan perspektif manajemen risiko yang sudah menjadi kebutuhan organisasi sektor publik bagi para praktisi yang saat ini aktif di berbagai lembaga negara, lembaga kementerian, organ pemerintahan (pusat dan daerah seperti Pemprov, Kabupaten/Kota), BUMN, BUMD, dan bahkan organisasi nirlaba serta akademisi yang bersinggungan dengan kepentingan sektor publik.

Sasaran utama organisasi sektor publik adalah terus meningkatkan kesejahteraan warga negaranya melalui berbagai pelayanan publik yang diberikan. Dalam pencapaian sasaran tersebut, organisasi sektor publik banyak menghadapi ketidakpastian yang berasal dari faktor eksternal dan internal.

Oleh karena itu, seiring dengan berkembangnya jumlah dan jenis risiko yang dihadapi oleh organisasi sektor publik, mereka membutuhkan penerapan manajemen risiko yang efektif dan terstandarisasi, serta sejalan dengan rujukan aturan dan peraturan yang relevan, seperti:

UUD 1945 Pasal 23 yang mengatur tentang Keuangan Negara; dan  
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan  
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; serta  
PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)  
Standar Manajemen Risiko Sektor Publik SNI ISO 31000:2018 hadir menjadi acuan bagi organisasi sektor publik.

## Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 - 2024



Memperkuat Ketahanan  
Ekonomi untuk Pertumbuhan  
yang Berkualitas



Mengembangkan Wilayah untuk  
Mengurangi Kesenjangan



Meningkatkan Sumber Daya  
Manusia yang Berkualitas dan  
Berdaya Saing



Membangun Kebudayaan dan  
Karakter Bangsa



Memperkuat Infrastruktur untuk  
Mendukung Pengembangan  
Ekonomi dan Pelayanan Dasar



Membangun Lingkungan Hidup,  
Meningkatkan Ketahanan  
Bencana dan Perubahan Iklim



Memperkuat Stabilitas  
Polhukhankam dan  
Transformasi Pelayanan Publik



## Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif  
dan efisien dalam mendukung peningkatan  
kinerja seluruh dimensi pembangunan

Indikator, antara lain:

- 1) Persentase instansi pemerintah yang menyusun rencana kebutuhan ASN jangka menengah, pengembangan kompetensi, dan pola karir
- 2) Persentase instansi pemerintah yang telah menyusun proses bisnis instansional
- 3) Persentase instansi pemerintah yang telah menyusun arsitektur SPBE instansional
- 4) Persentase instansi pemerintah yang menerapkan e-Arsip terintegrasi
- 5) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi
- 6) Penerapan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel
- 7) Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa instansional dengan maturitas level III
- 8) Jumlah unit pelayanan publik yang telah menerapkan standar pelayanan publik
- 9) Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui LAPOR! SP4N

Selain itu, untuk menerapkan unsur terkait penilaian risiko dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), organisasi sektor publik dapat menerapkan sistem manajemen risiko sesuai dengan Standar Manajemen Risiko Sektor Publik SNI ISO 31000:2018 ini.



## Manfaat

Tujuan implementasi manajemen risiko di organisasi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menciptakan dan melindungi nilai organisasi dalam rangka mencapai visi misi yang ditetapkan, dengan cara:

- Memahami konsep dasar ketidakpastian dan risiko sektor publik.
- Memahami SNI ISO 31000 sebagai standar nasional manajemen risiko.
- Memahami aspek fundamental manajemen risiko sektor publik, misalnya paparan aset terhadap risiko, paparan utang terhadap risiko, serta prinsip-prinsip pembiayaan risiko.
- Mempelajari pengalaman praktis penerapan manajemen risiko sektor publik.
- Mempelajari administrasi program manajemen risiko sektor publik.
- Simulasi analisis pengambilan keputusan berbasis risiko.



## Sertifikasi Profesional Manajemen Risiko

Dengan mengikuti 3 hari pelatihan ini, peserta berkesempatan untuk mengikuti sertifikasi yang dapat memberi pengakuan terhadap kemampuan profesional manajemen risiko. Sertifikasi dilaksanakan oleh LSP MKS yang memiliki lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) serta terakreditasi ISO 17024 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

**QRMO**

**Qualified Risk Management Officer**  
Pelaksana Manajemen Risiko Berkualifikasi

Diperuntukkan bagi pelaksana day to day manajemen risiko (staff, senior staff, atau eselon 5)

Persyaratan:

- Memiliki pengalaman kerja minimal 1 Tahun.
- Menyerahkan Dokumen Pendukung

**QRMA**

**Qualified Risk Management Analyst**  
Analisis Manajemen Risiko Berkualifikasi

Diperuntukkan bagi pengawas pelaksana (penyelia, asisten manajer, posisi manajemen tengah, atau eselon 4)

Persyaratan:

- Memiliki pengalaman kerja minimal 1 Tahun
- Menyerahkan Dokumen Pendukung



## Peserta

- Praktisi manajemen risiko sektor pemerintahan baik pusat maupun daerah.
- Praktisi manajemen risiko BUMN pelayanan publik.
- Praktisi manajemen risiko di berbagai lembaga negara.
- Pelaksana dan penanggung jawab di proyek pemerintah terutama untuk pembangunan infrastruktur baik yang berbentuk PPP (*Public Private Partnerships*) maupun yang murni milik pemerintah atau swasta.
- Penyelenggara program donor pelayanan publik.
- Pelaksana dan penanggung jawab berbagai inisiatif pemerintah yang menyentuh hajat hidup masyarakat luas, misalnya asuransi sosial, perbankan mikro dan pedesaan, perluasan bandara dan pelabuhan laut, dan pembangunan energi swadaya masyarakat.



## Silabus Pelatihan

- Konsep dasar ketidakpastian dan risiko sektor publik;
- Overview Standar Manajemen Risiko Sektor Publik SNI ISO 31000:2018;
- Implementasi Prinsip Manajemen Risiko Sektor Publik;
- Implementasi Kerangka Kerja Manajemen Risiko Sektor Publik seperti membuat peta jalan penerapan manajemen risiko dan struktur manajemen risiko;
- Implementasi Proses Manajemen Risiko Sektor Publik seperti melakukan proses penilaian risiko (identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko) dan proses perlakuan risiko.



SNI ISO 31000:2018  
Manajemen Risiko - Pedoman



SNI ISO 31000  
Panduan Untuk Implementasi  
SNI ISO 31004



Panduan Implementasi  
SNI ISO 31000:2018 di  
Sektor Publik

## Registrasi

Untuk registrasi,  
silahkan [KLIK DISINI](#) atau pindai QR CODE



Untuk informasi rinci program (biaya, lokasi, ketentuan, dan lain-lain),  
silahkan menghubungi Tim Sekretariat CRMS melalui email ke: [secretariat@crmsindonesia.org](mailto:secretariat@crmsindonesia.org)

# Host

Program ini akan didampingi serta difasilitasi oleh *host* atau fasilitator ahli dari CRMS Indonesia. Selain itu juga dapat mengundang pembicara tamu untuk berbagi pengalaman praktis dengan para peserta



## **Adnan Pandu Pradja, SH., Sp.N., L.L.M.**

Pakar bidang hukum yang aktif berbagi pengalaman, opini dan pengetahuan melalui artikel/tulisan di media masa. Beliau pernah menjabat sebagai wakil Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan merupakan anggota ISO/TC 309 Governance of organizations yang kerap mewakili Indonesia untuk berpartisipasi dalam kegiatan internasional ISO di berbagai negara, di antaranya ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (2017).

Selain berperan sebagai advokat di Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Adnan Pandupraja aktif sebagai Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 03-10 Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan di Badan Standardisasi Nasional (BSN). Beliau pernah menjadi dan sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Anggota Kelompok Kerja Reformasi Penegakan Hukum dan Peradilan (Pokja RPHP) Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden). Beliau juga aktif sebagai anggota KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) dan memiliki pengalaman sebagai Staff Khusus Menteri Perindustrian.



## **Dr. Antonius Alijoyo**

Praktisi dan akademisi yang sarat pengalaman dalam bidang manajemen risiko baik di tingkat nasional maupun internasional di berbagai negara di antaranya: Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Inggris, Skotlandia, Australia, Spanyol, Belanda, Perancis, Norwegia, Hungaria, Polandia, Afrika, Swiss, Singapura, Cina dan Uni Arab Emirates (UAE),

Saat ini aktif sebagai Ketua Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 03-10 Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan di Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan juga berperan sebagai ketua dewan pengarah/pengawas berbagai asosiasi bidang tatakelola (KNKG), manajemen risiko (IRMAPA) dan kepatuhan (ICoPI). Sebelumnya, beliau pernah berkarya di beberapa institusi publik di antaranya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai dewan audit, di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai komite manajemen risiko, dan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai steering committee teknologi informasi dan manajemen risiko. Di samping itu, beliau juga pernah dan masih menjabat di berbagai institusi swasta sebagai komisar independen.



## **Dr. Waluyo**

Pakar bidang sektor publik dengan pengalaman sebagai Komisioner Aparatur Sipil Negara (ASN), yang membangun komisi baru untuk mengawal pelaksanaan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara. Beliau pernah menjabat sebagai wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang ikut membangun kesisteman di awal terbentuknya organisasi KPK dan melakukan program transformasi selama di Pertamina.

Beliau juga adalah Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 03-10 Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan di Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan anggota ISO/TC 309 *Governance of organizations* yang kerap mewakili Indonesia untuk berpartisipasi dalam kegiatan internasional ISO di berbagai negara di antaranya: Amerika Serikat, Eropa, Australia dan Asia. Beliau juga adalah Wakil Ketua Bidang Governance Publik dalam Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Beliau berpengalaman lebih dari 30 tahun di organisasi modern, baik di perusahaan dunia (BP, merger company of British Petroleum, Amoco, Atlantic Richfield Company dan Veba) maupun di BUMN Pertamina dengan penugasan dan kepemimpinan baik di operasional maupun bisnis pendukung.



## Misi

Memfasilitasi akselerasi praktik Governansi, Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Keberlangsungan di Indonesia melalui pengembangan keilmuan dan inisiatif untuk berbagi ke masyarakat luas.

## Aktivitas

Sebagai pusat edukasi yang memfasilitasi berbagai kegiatan serta inisiatif dalam rangka berbagi keilmuan Governansi, Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Keberlangsungan baik untuk komunitas praktisi maupun akademisi.

## CRMS

Jl. Batununggal Indah IV No. 97  
Bandung - 40267, Indonesia  
Phone. (+6222) 8730-1035  
Mobile. (+62) 81 222 200 775

Website. [www.crmsindonesia.org](http://www.crmsindonesia.org)  
Email. [secretariat@crmsindonesia.org](mailto:secretariat@crmsindonesia.org)

## Our Social Media

 CRMS Indonesia  
 @crmsindonesia  
 CRMS Indonesia  
 CRMS Indonesia  
 @crmsindonesia